



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul	: Sejumlah Alasan Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Tanggal	: Jumat, 23 Desember 2016
Surat Kabar	: Seputar Indonesia
Halaman	: -

JAKARTA - Kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia bagi warga negara asing (WNA) untuk 169 negara, dinilai telah menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Terlebih pada hari-hari belakangan ini semakin banyak tenaga kerja asing (TKA) yang menyalahgunakan visa masuk tersebut untuk bekerja. Maka itu, Pemerintah diminta evaluasi dan menghentikan kebijakan bebas visa bagi WNA ke Indonesia. "Fakta ini sebetulnya tidak bisa dibantah begitu saja," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Jumat (23/12/2016). Kata Saleh, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), imigrasi, dan kepolisian telah banyak melakukan penangkapan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran. "Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dia berpendapat, ada beberapa alasan mengapa kebijakan bebas visa itu harus dicabut. Pertama, tujuan bebas visa untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara terbukti tidak berhasil. Kedua, kebijakan bebas visa itu telah menghilangkan potensi penghasilan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,3 triliun. Dengan kebijakan bebas visa, penerimaan negara dari biaya penerbitan visa reguler dan on arrival menjadi hilang. Ketiga, kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia belum maksimal. Akibatnya lanjut dia, ada banyak temuan di mana visa kunjungan wisata digunakan untuk kerja. "Begini juga, koordinasi antarkementerian lembaga terkait dinilai belum berjalan dengan baik," ungkapnya. Dia menambahkan, pemerintah harus lebih fokus menciptakan lapangan kerja bagi WNI. Karena itu, investasi asing yang masuk semestinya dimaksimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI. "Dengan begitu, pengiriman TKI ke luar negeri bisa diminimalisir," pungkasnya. (maf)